

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENERIMAAN PAJAK PARKIR DI KOTA MEDAN

Syarif Hidayah Lubis
Universitas Putera Batam
hidayahsyarif@gmail.com

Agus Defri Yando
Universitas Putera Batam
aguspeace89@gmail.com

ABSTRACT

The purpose of this study is to find some Factors what comes to you of that affects the country tax receipts in on street parking areas in of the city of medan .Was used in the study of secondary data that is in have received as a gift from a source of the local treasury office the of the city of medan , the local treasury office the the government the province of north sumatra and the central bureau of statistics of a region of the of the city of medan .Of the number of observations in this research was 36 months, from january 2013 until december 2015. The data analyzed by put it through statistical analysis descriptive, economic assumptions agreed to at the fit and proper test classical and the regression . This partial shows that individual tax payers should be it has some positive effects and significantly correlates with the country tax receipts in parked with the value of significant 0,001. The number of residents in it has some positive effects and significantly correlates with the reception of the parking tax. With a value of up 0,000 markets to boost its economy .The number of vehicles it has some positive effects and significantly correlates with the country tax receipts in parked with the value of significant 0,000 .Inflation rate from going further it has some positive effects and significantly correlates with the country tax receipts in parked with the value of significant 0,002 . Simultaneously where i am shows that the number of individual tax payers should be , the number of kendaraan , the total population and year inflation rate bersama-sama significant on either earnings the parking tax. It is able to be seen through the test and been approved f-tabel at the top with the value of significant 0,000 value is smaller than the $\alpha = 0,05$ ($0,000 < \alpha = 0,05$).

Keywords: *The number of shall be obliged to the parking tax , the population of each district , the number of vehicles and the inflation rate , the reception of the parking tax*

PENDAHULUAN

Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan (UU No. 32/2004).

Dengan diterapkannya otonomi daerah, diharapkan langkah antisipasi berbagai masalah yang terdapat di suatu daerah dapat lebih

efektif, mengingat pemerintah daerah dianggap lebih banyak mengetahui berbagai masalah yang dihadapi oleh masyarakatnya dibandingkan dengan pemerintah pusat. Selain itu, pembangunan sosial dan ekonomi juga diharapkan mengalami percepatan peningkatan.

Konsekuensi dari pelimpahan wewenang yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam asas otonomi, menuntut

kemandirian suatu daerah dalam mengelola daerahnya sendiri, termasuk dalam hal keuangannya.

Menindak lanjuti konsekuensi tersebut, maka pemerintah daerah perlu mengoptimalkan pendapatan yang bersumber dari daerahnya sendiri untuk menjalankan keter selenggaraan urusan pemerintahan. Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.

Pemberian kewenangan dalam pengenaan pajak diharapkan dapat lebih mendorong Pemerintah Daerah terus berupaya untuk mengoptimalkan PAD, khususnya yang berasal dari pajak daerah karena pajak daerah merupakan bagian dari PAD yang terbesar (Suparmoko, 2000).

Pajak daerah merupakan pajak yang di kelola oleh pemerintah daerah (baik pemerintah daerah provinsi maupun pemerintah daerah Kabupaten/Kota) dan hasilnya dipergunakan untuk membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan daerah (Aritonang & Marsyahrul, 2008). Oleh karena itu, Pemerintah Daerah perlu terus mengintensifkan penerimaan pajak dengan terus menggali potensi - potensi pajak yang terdapat di daerah tersebut.

Sektor perparkiran merupakan salah satu potensi yang dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak daerah. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang No.

28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Kota Medan merupakan salah satu kota dengan populasi, luas daerah, serta arus komuter besar di Indonesia yang menjadikan Kota Medan sebagai kota terbesar ketiga di Indonesia. sebagaimana dinyatakan oleh Walikota Medan Drs. Dzulmi Eldin M.Si (2016). Sebagai kota besar, maka pembangunan yang dilakukan akan membutuhkan pembiayaan yang besar pula. Oleh karena itu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam sektor perpajak merupakan salah satu sumber pembiayaan yang perlu digali oleh Pemerintah Kota Medan, termasuk pajak parkir yang sangat potensial.

Penelitian ini mengenai pajak parkir yang belum banyak diteliti oleh orang lain namun variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini telah banyak digunakan oleh peneliti lain namun variabel independennya bukan pajak parkir.

Sutrisno (2002), dengan judul “Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah (Studi Kasus di Kab. Semarang)” mengungkapkan bahwa Peningkatan perkapita berpengaruh positif baik terhadap pajak Hotel & restoran maupun pajak parkir.

Agustina (2012), dengan judul “Pengaruh Pengelolaan Pemungutan Pajak Parkir Terhadap Realisasi Penerimaan Pajak Parkir” Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh positif yang signifikan sebesar 0,643 antara pengelolaan pemungutan pajak parkir terhadap realisasi penerimaan pajak parkir kota Bandung.

Hasan dan Suratman (2011) dalam penelitiannya yang berjudul “An Analysis of the Implementation of Parking Management Policies in

Increasing the Regional Income of Makassar City” menunjukkan hasil kontribusi retribusi parkir terhadap pendapatan daerah selama 5 tahun (2007-2011) terakhir relatif tidak signifikan di rata-rata 0,50%. Kontribusi pajak parkir terhadap pendapatan daerah selama 5 tahun terakhir telah menunjukkan jumlah yang lebih tinggi pada rata-rata 1,26%. Kontribusi yang lebih tinggi dari pajak parkir dari retribusi itu karena pengenaan pajak itu dipungut bulanan atau tahunan, dan objek pajak parkir difokuskan pada perusahaan kontributor bukan individual. Kendala utama dalam melaksanakan kebijakan manajemen parkir di kota Makassar yang ditemukan pada: (1) manajemen (2) keterampilan sumber daya manusia dalam pemetaan.

Marselina (2013) melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Kontribusi Pajak Parkir dan Retribusi Pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Pemerintah Kota Padang”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontribusi pajak parkir hasilnya berfluktuatif dengan kisaran 0,01% - 0,17%, sangat jauh dari efektif. Kontribusi retribusi pasar hasilnya juga berfluktuatif dari tahun ke tahun namun sudah bagus dari kontribusi pajak parkir yaitu berkisar dari 2% - 4%, sedangkan kontribusi pajak parkir terhadap pajak daerah kontribusinya dari tahun ke tahun selalu mengalami penurunan, kisaran rata - rata rasionya berkisar 5% - 3%. Adapun kontribusi retribusi pasar terhadap retribusi daerah sudah mulai membaik di bandingkan sebelumnya, dimana hasilnya sudah mendekati efektif dengan kisaran 11% - 14%.

Penelitian yang dilakukan oleh Litmann, (2003) dengan judul “*Parking Taxes Evaluating Options and Impacts*” menunjukkan hasil

bahwa secara umum *commercial parking taxes* (pajak khusus atas transaksi sewa parkir) relatif mudah untuk menerapkan tetapi cenderung bertentangan tujuan perencanaan. Adapun *Per-space Parking Levy* (pajak khusus diterapkan untuk fasilitas parkir) lebih menantang untuk dilaksanakan karena memerlukan inventarisasi kualifikasi fasilitas parkir, tetapi mendorong pemilik properti untuk mengurangi pasokan parkir (khususnya ruang yang jarang digunakan) dan mengelola mereka pasokan parkir lebih efisien, dan itu mendorong harga parkir.

Malombeke (2016) dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Potensi dan Efektivitas Pemungutan Pajak Parkir di Kabupaten Minahasa Utara” mengungkapkan bahwa setiap tahun perolehan potensi pajak parkir dapat meningkat dilihat dari peningkatan tahun 2016 dengan jumlah Rp. 16.014.340. Tahun 2017 Rp. 20.146.039, tahun 2018 Rp. 25.343.717, tahun 2019 Rp. 31.882.395 dan tahun 2020 dengan jumlah Rp. 40.108.052 dan tingkat efektivitas yang bervariasi. Tingkat efektivitas tertinggi pajak parkir tahun 2015 bulan desember 1,5% (150%) dibandingkan dengan bulan desember tahun 2014 sebesar 66,66% namun melihat dari perhitungan potensi menunjukan perkembangan yang baik karena selalu meningkat setiap tahunnya. Sebaiknya Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (DISHUB) di Kabupaten Minahasa Utara harus melakukan perhitungan ulang terhadap penetapan target pemungutan Pajak Parkir agar sesuai dengan potensi riil yang dimiliki.

Sesuai dengan uraian di atas, maka topik yang diteliti adalah Faktor-Faktor yang Mempengaruhi

Penerimaan Pajak Parkir Di Kota Medan

Adapun yang menjadi tujuan penelitian adalah :

"Mengetahui dan menganalisis pengaruh wajib pajak, jumlah penduduk, jumlah kendaraan dan inflasi secara simultan dan parsial terhadap penerimaan pajak parkir di Kota Medan".

KERANGKA TEORITIS

Wajib Pajak Parkir

Wajib pajak merupakan jumlah orang pribadi atau badan yang terdaftar dan memiliki nomor pokok wajib pajak, meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban atas perpajakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan perpajakan. Wajib pajak bisa berupa wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak badan. Wajib pajak pribadi adalah setiap orang pribadi yang memiliki penghasilan diatas pendapatan tidak kena pajak (Rahman, 2011).

Jumlah Penduduk

Menurut Budiharjo (2003:25) mengatakan bahwa, jumlah penduduk yang besar bagi Indonesia oleh perencanaan pembangunan dipandang sebagai asset modal besar pembangunan tetapi sekaligus juga

sebagai beban. Pembangunan sebagai asset apabila dapat meningkatkan produksi nasional.

Jumlah Kendaraan

Jumlah kendaraan bermotor di Indonesia menunjukkan angka pertumbuhan yang tinggi mencapai 20 juta kendaraan bermotor (Gusnita, 2010). Semakin banyak jumlah kendaran bermotor, diharapkan akan meningkatkan penerimaan Pajak Kendaran Bermotor (Nuringsih, 2006).

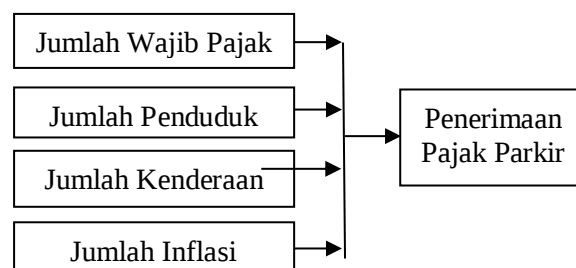
Inflasi

Lerner mengungkapkan (1976:43) inflasi adalah keadaan dimana terjadi kelebihan permintaan (*excess demand*) terhadap barang dan jasa secara keseluruhan. Sukirno (2004:56), inflasi merupakan suatu proses kenaikan harga-harga yang berlaku secara umum dalam suatu perekonomian.

Penerimaan Pajak Parkir

Dalam UU No. 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, "Pajak parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor."

Kerangka konsep pada penelitian ini ditunjukkan pada gambar sebagai berikut:



Gambar 1 : Kerangka Konsep

METODOLOGI

Penelitian ini adalah penelitian pengujian hipotesis (*hypothesis testing*) yang bertujuan untuk menguji hipotesis yang diajukan oleh peneliti mengenai pengaruh jumlah wajib pajak, jumlah penduduk, jumlah kendaraan dan Jumlah Inflasi terhadap penerimaan pajak parkir. Menurut Sekaran (2006), pengujian hipotesis harus dapat menjelaskan sifat dari hubungan tertentu, memahami perbedaan antar kelompok atau independensi dua variabel atau lebih.

Di dalam penelitian ini menggunakan pengamatan data penerimaan pajak parkir selama 3 tahun dengan pengamatan bulanan (*Time Series*), sehingga pengamatan yang diperoleh menjadi 36 bulan yakni dari bulan Januari 2013 - Desember 2015. Data yang digunakan berupa data sekunder laporan penerimaan pajak parkir, jumlah wajib pajak parkir, jumlah kendaraan, jumlah penduduk Jumlah Inflasi di kota Medan. Dari uraian definisi operasional variable diatas dapat dilihat dalam bentuk tabel dibawah ini:

Tabel 1. Definisi Operasional Variabel

Jenis Variabel	Definisi	Indikator	Skala Pengukuran
Jumlah Wajib Pajak (X_1)	Jumlah Wajib Pajak (WP) adalah Orang Pribadi atau Badan yang terdaftar dan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) menurut ketentuan peraturan perundang - undangan perpajakan yang ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan dibidang pajak parkir.	Jumlah wajib pajak parkir	Rasio
Jumlah Penduduk (X_2)	Semua orang yang berdomisili di wilayah geografis suatu daerah selama 6 bulan atau lebih dan/atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap.	Jumlah penduduk	Rasio
Jumlah Kendaraan (X_3)	Jumlah dari seluruh kendaraan bermotor yang teregistrasi dalam pencatatan data Dinas Pendapatan Daerah.	Jumlah kendaraan	Rasio
Inflasi (X_4)	Tingkat kenaikan harga-harga secara umum dan terus-menerus dalam periode tertentu.	Laju inflasi	Rasio
Penerimaan Pajak Parkir (Y)	Pembayaran yang diterima dari wajib pajak parkir orang pribadi atau badan melalui pemotongan pajak atas jasa parkir yang digunakan.	Penerimaan pajak parkir	Rasio

Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah teknik analisis statistik dengan melakukan pengujian regresi berganda dari data sekunder. Peneliti melakukan terlebih dahulu uji asumsi klasik sebelum melakukan uji hipotesis. Kuncoro (2001) menyatakan bahwa "satu di antara syarat mendasari penggunaan model regresi adalah

dipenuhinya semua asumsi klasik", agar hasil pengujian bersifat tidak bias dan efisien dengan bantuan SPSS. Metode analisis data menggunakan statistik deskriptif, uji asumsi klasik dan uji regresi berganda.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN Statistik deskriptif

Statistik deskriptif ini variabel.
memberikan gambaran mengenai data

Tabel 2. Perkembangan Jumlah Wajib Pajak

Bulan / Tahun	2013	2014	2015
Januari	47	57	110
Februari	47	60	124
Maret	47	62	129
April	50	64	136
Mei	50	66	142
Juni	51	68	152
Juli	53	70	156
Agustus	53	70	158
September	54	73	158
Oktober	56	76	161
November	57	77	161
Desember	57	77	161

Sumber : Data Dispenda Kota Medan, diolah 2016

Berdasarkan data di atas bahwa trend 2015 yang jumlah wajib pajak perkembangan jumlah wajib pajak meningkat drastis dari 70-an hingga setiap tahun meningkat terutama tahun 160-an wajib pajak.

Tabel 3. Perkembangan Jumlah Penduduk

Bulan / Tahun	2013	2014	2015
Januari	2,117,429	2,127,891	2,196,214
Februari	2,113,261	2,132,974	2,200,884
Maret	2,110,233	2,138,392	2,205,083
April	2,108,278	2,144,078	2,208,744
Mei	2,107,329	2,149,963	2,211,801
Juni	2,107,318	2,155,983	2,214,186
Juli	2,108,179	2,162,068	2,215,831
Agustus	2,109,845	2,168,153	2,216,671
September	2,112,248	2,174,169	2,216,637
Oktober	2,115,321	2,180,051	2,215,663
November	2,118,998	2,185,730	2,213,681
Desember	2,123,210	2,191,140	2,221,021

Sumber : Data Statistik Sumatera Utara, diolah 2016

Berdasarkan data di atas bahwa trend jumlah penduduk meningkat terus dari perkembangan jumlah penduduk tahun 2013 hingga 2015 yang warga kota Medan setiap tahun memungkinkan besar peluang banyak meningkat terutama tahun 2015 yang masyarakat yang akan menggunakan

alat transportasi pribadi sehingga dapat penerimaan pajak parkir.
diduga akan meningkatkan jumlah

Tabel 4. Perkembangan Jumlah Kendaraan

Bulan / Tahun	2013	2014	2015
Januari	158.862	486.416	847.832
Februari	185.462	513.266	872.549
Maret	211.323	537.107	899.347
April	242.662	567.421	924.609
Mei	269.116	589.001	949.001
Juni	293.533	620.563	976.094
Juli	323.302	646.404	1.003.368
Agustus	350.879	678.712	1.028.830
September	382.197	720.606	1.056.674
Oktober	411.397	757.590	1.082.223
November	435.485	788.798	1.104.267
Desember	463.451	820.216	1.125.817

Berdasarkan data di atas bahwa trend perkembangan jumlah kendaraan di Kota Medan setiap tahun meningkat dari tahun 2013 hingga tahun 2015 mengindikasikan banyaknya jumlah kendaraan yang terdaftar dan

teregistrasi di Kota Medan sehingga memberikan peluang untuk meningkatkan pendapatan daerah dalam bidang sektor pajak parkir di Kota Medan.

Tabel 5. Jumlah Inflasi (%)

Bulan / Tahun	2013	2014	2015
Januari	1.21	1.00	-0.35
Februari	0.80	-0.59	-1.36
Maret	0.42	-0.34	-0.01
April	0.74	0.34	0.96
Mei	0.34	0.30	1.01
Juni	1.28	0.60	0.77
Juli	2.74	0.80	0.82
Agustus	0.50	0.67	0.59
September	0.12	0.23	2.44
Oktober	1.00	0.71	-0.33
November	0.61	1.75	0.53
Desember	-0.07	2.53	1.37

Sumber : Data Badan Pusat Statistik Sumatera Utara, diolah 2016

Berdasarkan data di atas bahwa trend Jumlah Inflasi di Kota Medan setiap tahun mengalami fluktuasi terutama di bulan Mei-Oktober memiliki sumbangsih inflasi yang tinggi yang berdampak pada kenaikan harga

sehingga dampaknya pada meningkatnya disemua harga harga yang menyebabkan kecilnya kemungkinan masyarakat untuk membayar pajak.

Tabel 6. Perkembangan Jumlah Penerimaan Pajak

Bulan / Tahun	2013	2014	2015
Januari	549.137.300,00	460.060.983,00	860.312.348,00
Februari	1.247.064.576,51	1.043.600.654,26	1.710.856.423,00
Maret	1.844.774.177,15	1.550.861.139,26	2.786.438.491,61
April	2.340.710.894,15	2.192.890.970,26	3.816.515.910,61
Mei	3.044.229.253,60	2.532.807.087,59	4.697.037.165,61
Juni	3.677.717.450,27	3.491.374.027,09	5.749.293.127,61
Juli	4.291.134.853,67	4.091.327.752,67	6.779.018.515,54
Agustus	5.101.574.230,67	4.855.749.425,67	7.623.193.090,54
September	5.619.677.460,67	5.661.139.147,67	8.595.198.102,54
Oktober	6.102.884.535,00	6.380.122.943,47	9.822.507.048,54
November	6.639.287.918,00	7.249.500.252,14	10.855.964.209,54
Desember	7.317.646.365,67	8.119.739.943,14	11.649.898.659,54

Sumber : Data Dispenda Kota Medan, diolah 2016

Berdasarkan data di atas bahwa trend perkembangan jumlah wajib pajak setiap tahun meningkat terutama tahun 2015 yang jumlah penerimaan pajak parkir meningkat drastis dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Uji Hipotesis

1. Koefisien Determinasi

Nilai Koefisien (R) sebesar 0,803 yang menunjukkan hubungan antara variabel yang kuat, dengan koefisien

determinasi (*R square*) sebesar 0,645 atau 64,5% dalam kategori sedang. Nilai ini berarti variabel jumlah wajib pajak, pertumbuhan penduduk, jumlah kendaraan dan inflasi dapat menjelaskan variabel Penerimaan Pajak Parkir sebesar 60,3%. Sedangkan sisanya 35,5% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Berikut disajikan pada tabel dibawah ini :

Tabel 7. Uji Koefisien Determinasi

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.803 ^a	.645	.599	187.20339

a. Predictors: (Constant), inflasi, jumlah penduduk, wajib pajak, jumlah kendaraan

b. Dependent Variable: Penerimaan Pajak Kendaraan

2. Uji F

Pada Tabel 8 dapat dilihat bahwa diperoleh nilai F_{hitung} adalah 14,087 dengan tingkat signifikansi 0,000. Dengan penggunaan tingkat signifikansi (α) 5%. Berdasarkan Tabel diperoleh $0,000 < 0,05$, ini menunjukkan bahwa secara simultan variabel jumlah wajib pajak, jumlah penduduk, jumlah kendaraan, dan inflasi berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Parkir. Hasil analisis ini diperkuat dengan

membandingkan antara F_{hitung} 14,087 yang jauh lebih besar dari F_{tabel} yaitu 2,53 dimana F_{tabel} dihitung dengan menggunakan ketentuan tingkat signifikansi 5%, dengan $df=n-k-1$ (pada penelitian ini $df=36-5-1=30$), sehingga didapat nilai F_{tabel} sebesar 2,53 maka $F_{hitung} > F_{tabel}$ atau $14,087 > 2,53$ sehingga dapat disimpulkan bahwa secara simultan semua variabel independent berpengaruh positif dan signifikan atau H_1 diterima. Berikut disajikan pada tabel dibawah ini :

**Tabel 8. Uji F
ANOVA^b**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1974764.830	4	493691.207	14.087	.000 ^a
	Residual	1086398.427	31	35045.111		
	Total	3061163.256	35			

a. Predictors: (Constant), inflasi, jumlah penduduk, wajib pajak, jumlah kendaraan

b. Dependent Variable: Penerimaan Pajak Parkir

3. Uji t

Uji parsial (Uji t) pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh satu variabel independen secara individual atau parsial dapat menerangkan variasi variabel dependen. Metode dalam

penentuan t tabel menggunakan ketentuan tingkat signifikansi 5%, dengan $df=n-k-1$ (pada penelitian ini $df=36-5-1=30$), sehingga didapat nilai t tabel sebesar 2,042. Hasil uji t dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 9. Uji t

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	28284.055	7209.177		3.923	.000
	wajib pajak	10.838	2.975	.266	3.643	.001
	jumlah penduduk	1366.339	348.331	1.970	3.923	.000
	jumlah kendaraan	22.617	5.126	2.277	4.412	.000
	inflasi	125.483	37.916	.355	3.310	.002

a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak Parkir

Sumber: Output SPSS

Dari nilai-nilai koefisien tersebut, maka dapat disusun persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 28284,055 + 10,838X_1 + 1366,339X_2 + 22,617X_3 + 125,483X_4 + \varepsilon$$

Berdasarkan persamaan regresi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Nilai t_{hitung} untuk jumlah wajib pajak adalah 10,838 dengan tingkat signifikansi 0,001 maka variabel jumlah wajib pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Parkir dengan nilai t_{hitung} (3,643) > t_{tabel} (2,042) dan nilai signifikan (0,001) < 0,05.
2. Nilai t_{hitung} untuk jumlah pertumbuhan penduduk adalah 1366,339 dengan tingkat signifikansi 0,000 maka variabel jumlah pertumbuhan penduduk berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Penerimaan Pajak Parkir dengan nilai t_{hitung} (3,923) > t_{tabel} (2,042) dan nilai signifikan (0,000) < 0,05.
3. Nilai t_{hitung} untuk jumlah kendaraan adalah 22,617 dengan tingkat signifikansi 0,000 maka variabel jumlah kendaraan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Penerimaan Pajak Parkir dengan nilai t_{hitung} (4,412) > t_{tabel} (2,042) dan nilai signifikan (0,000) < 0,05.
4. Nilai t_{hitung} untuk inflasi adalah 125,483 dengan tingkat signifikansi 0,002 maka variabel inflasi berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Penerimaan Pajak Parkir dengan nilai t_{hitung} (3,310) > t_{tabel} (2,042) dan nilai signifikan (0,002) < 0,05.
5. secara parsial menunjukkan bahwa wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penerimaan Pajak Parkir. Hal ini dapat dilihat

dengan nilai signifikan 0,001 lebih kecil dari $\alpha = 0,05$. wajib pajak akan mampu meningkatkan Penerimaan Pajak Parkir dikarenakan semakin tinggi wajib pajak maka akan meningkatkan upaya wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya sehingga berdampak positif terhadap Penerimaan Pajak Parkir dan nilai jumlah wajib pajak dibandingkan dengan tahun sebelumnya (2013 dan 2014) di tahun 2015 lebih meningkat.

1. secara parsial menunjukkan bahwa jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penerimaan Pajak Parkir. Hal ini dapat dilihat dengan nilai signifikan 0,000 lebih kecil dari $\alpha = 0,05$. Menurut Budiharjo (2003:25) mengatakan bahwa, jumlah penduduk yang besar bagi Indonesia oleh perencanaan pembangunan dipandang sebagai asset modal besar pembangunan tetapi sekaligus juga sebagai beban. Pembangunan sebagai asset apabila dapat meningkatkan produksi nasional. Hal ini juga sejalan dengan penelitian Muhammad Masrofi (2004) bahwa jumlah penduduk, berpengaruh terhadap penerimaan pajak.

2. secara parsial menunjukkan bahwa Jumlah kendaraan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penerimaan Pajak Parkir. Hal ini dapat dilihat dengan nilai signifikan 0,000 lebih kecil dari $\alpha = 0,05$. Jumlah kendaraan adalah variabel yang paling logis dan dominan karena dasar perhitungan pajak parkir adalah satuan dari jumlah unit kendaraan yang ada di suatu wilayah termasuk di kota Medan. Penelitian ini berbeda dengan penelitian oleh Sutrisno (2002), yang menyatakan bahwa jumlah kendaraan tidak berpengaruh secara signifikan. Terhadap pajak parkir. Peningkatan jumlah kendaraan bermotor juga

terjadi di Indonesia. Data dari Asosiasi Industri Otomotif Indonesia (Gaikindo) dan Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI) menunjukkan jumlah populasi kendaraan bermotor di Indonesia hingga 2014 mencapai 111.917.270 unit. Jumlah kendaran bermotor akan mempengaruhi penerimaan Pajak parkir secara tidak langsung. Semakin banyak jumlah kendaran bermotor, diharapkan akan meningkatkan penerimaan Pajak parkir (Nuringsih, 2006).

3. secara parsial menunjukkan bahwa Inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penerimaan Pajak parkir. Hal ini dapat dilihat dengan nilai signifikan 0,002 lebih kecil dari $\alpha = 0,05$. Ini disebabkan karena dengan keterbatasan parkir yang tersedia tidak mencukupi/tidak dapat menampung permintaan kendaraan untuk parkir sehingga pengelola parkir akan menaikkan tarif parkir, nantinya hasil pungutan atas tarif parkir tersebut akan disetorkan 10% kepada pemerintah daerah selaku pemungut pajak parkir yang pada akhirnya akan berkontribusi pada penerimaan pajak parkir. Lerner mengungkapkan (1976:43) inflasi adalah keadaan dimana terjadi kelebihan permintaan (*excess demand*) terhadap barang dan jasa secara keseluruhan. Menurut teori Keynes, inflasi terjadi karena suatu masyarakat ingin hidup di luar batas kemampuan ekonominya. Menurut pandangan teori ini, proses inflasi terjadi tidak lain karena perebutan bagian di antara kelompok-kelompok sosial yang menginginkan bagian yang lebih besar dari pada yang bisa disediakan oleh masyarakat tersebut. Proses ini kemudian diterjemahkan menjadi keadaan dimana permintaan masyarakat akan jasa parkir selalu melebihi jumlah ketersediaan parkir.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Sutrisno (2002) yang menyatakan bahwa inflasi berpengaruh secara negative.

4. Secara simultan menunjukkan bahwa jumlah wajib pajak, jumlah kendaraan, jumlah Penduduk dan Inflasi secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Parkir. Hal ini dapat dilihat melalui uji F-tabel di atas dengan nilai signifikan 0,000 lebih kecil dari $\alpha = 0,05$ ($0,000 < \alpha = 0,05$) atau H_1 diterima. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Sutrisno (2002) dan penelitian Muhammad Masrofi (2004).

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data serta pembahasan yang dilakukan, maka penelitian ini menghasilkan kesimpulan sebagai berikut :

Secara simultan bahwa jumlah wajib pajak, jumlah kendaraan, jumlah Penduduk dan Inflasi secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Parkir. Dan secara parsial wajib pajak, jumlah penduduk, jumlah kendaraan dan inflasi juga berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan pajak parkir di Kota Medan.

Adapun saran atas penelitian di atas, adalah sebagai berikut:

Objek penelitian selanjutnya diharapkan meneliti di seluruh Kabupaten/Kota provinsi Sumatera Utara sehingga cakupan penelitian lebih luas dan dapat menggambarkan bagaimana tentang pajak parkir yang ada di provinsi Sumatera Utara. Peneliti selanjutnya diharapkan menambah variabel independen antara lain pendapatan perkapita, konsumsi masyarakat atau investasi. Peneliti selanjutnya diharapkan menambah

jumlah pengamatan sehingga data yang diperoleh lebih dari 36 bulan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina. 2012. *Pengaruh Pengelolaan Pemungutan Pajak Parkir Terhadap Realisasi Penerimaan Pajak Parkir*
- Aritonang, JM dan Tony Marsyahrul. 2008. *Perpajakan Internasional; sebagai Materi Studi di Perguruan Tinggi*. PT. Gramedia Widiasarana Indonesia. Jakarta
- Asmuruf, MF, dkk. *Pengaruh Pendapatan dan Jumlah Penduduk Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Sorong*. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi Vol: 15 No. 5 Tahun 2015.
- Badan Pusat Statistik. www.bps.go.id
- Barrios, Salvador & Pietro Rizz. 2010. *Unexpected changes in tax revenues and the stabilisation function of fiscal policy: Evidence for the European Union 1999-2008*.
- Budiharjo, Ari. 2003. *Pengaruh Jumlah Penduduk, Pendapatan Domestik Regional Bruto, dan Inflasi Terhadap Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Pada Kabupaten dan Propinsi di Jawa Tengah*.
- Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, *Ekstensifikasi WP Baru Lampau Target*. 2015. <http://www.pajak.go.id/content/article/ekstensifikasi-wp-baru-lampau-target>
- Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo). 2011. *Kendaraan Bermotor di Indonesia Terbanyak di ASEAN*. <https://otomotif.tempo.co/read/news/2011/08/19/124352572/kendaraan-bermotor-di-indonesia-terbanyak-di-asean>
- Gusnita, D. 2010. *Green Transport ; Transportasi Ramah Lingkungan dan Kontribusinya dalam Mengurangi Polusi Udara*. Berita Dirgantara.
- Ghozali, Imam. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Edisi 5. Semarang : BP Undip.
- Hasan, Abdul Rachman & Suratman. 2011. *An Analysis of the Implementation of Parking Management Policies in Increasing the Regional Income of Makassar City*.
- Badan Pusat Statistik Sumut, <https://www.bps.go.id/subjek/view/id/11>, 2017
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (Edisi Keempat), 2008
- Kementerian Keuangan. *Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2008*.
- Kuncoro, Mudrajat. 2001. *Metode Kuantitatif*. Yogyakarta: Penerbit AMP.
- Litmann, Todd. 2003. *Parking Taxes Evaluating Options and Impacts*. Victoria Transport Policy Institute.
- Lerner, RM. 1976. *Concepts and Theories of Human Development*. Philippines: Addison Wesley.
- Malombeke, Novelia. 2016. *Analisis Potensi dan Efektivitas Pemungutan Pajak Parkir di Kabupaten Minahasa Utara*
- Masrofi, Muhammad. 2004. *Potensi dan Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Semarang*.
- Marselina, Ega. 2013. *Analisis Kontribusi Pajak Parkir dan Retribusi Pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Pemerintah Kota Padang*.

- Nuringsih, M. 2006. *Analisis Penrimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Sebelum dan Sesudah Desentralisasi Fiskal di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*.
- Pemerintah Kota Medan. 2016. *Walikota: Pembangunan Kota Medan Diarahkan Menjadi Kota Jasa dan Kota Masa Depan*. <http://www.pemkomedan.go.id/artikel-15264-walikota--pembangunan-kota-medan-diarahkan-menjadi-kota-jasa-dan-kota-masa-depan.html>
- Rahman. 2011. *Pengaruh Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Pelayanan Fiskus Pada Kepatuhan Wajib Pajak*. Jurnal Ekonomi Manajemen Sumber Daya, Vol. 12, No. 2.
- Sekaran, Uma. 2006. *Research MetHypothesis for Business : "Metodologi Penelitian untuk Bisnis*. Edisi 4. Jakarta : Salemba Empat.
- Siahaan, MariHypothesis Pahala, 2013. *Pajak daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Sukirno, Sadono. 2004. *Makro Ekonomi Teori Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Perkasa.
- Suparmoko, M. 2000. *Keuangan Negara Dalam Teori dan Praktek*. BPFE Yogyakarta. Yogyakarta
- Sutrisno. 2002. *Analisis Faktor-Faktor yang mempengaruhi penerimaan Pajak Daerah (Studi Kasus di Kabupaten Semarang)*.
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 *tentang Pemerintah Daerah*
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 *tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah*
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 *tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*